



merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.<sup>29</sup>

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap dan arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional.<sup>30</sup>

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga determinan yang harus diperhatikan. Pertama adalah kepentingan nasional, dimana politik luar negeri adalah pencerminan dari kepentingan nasional suatu negara terhadap lingkungan luarnya. Hal tersebut diungkapkan oleh J. Frankel, salah seorang ahli politik yang beranggapan bahwa politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri, yang tidak terpisah dari keseluruhan tujuan nasional, dan tetap merupakan komponen atau unsur dari kondisi dalam negeri.<sup>31</sup>

Determinan kedua yang berhubungan dengan politik luar negeri adalah kemampuan nasional. Kemampuan nasional adalah kemampuan yang dimiliki suatu bangsa, baik secara actual maupun bersifat potensial. Dengan kemampuannya, segenap daya bangsa baik yang manifest maupun latent yang meliputi segala sumber daya yang melekat pada bangsa yang bersangkutan.

Determinan ketiga adalah kondisi internasional dengan sifatnya yang dinamis. Setiap negara merumuskan kebijakan politik luar negeri, tetapi tidak

---

<sup>29</sup> Anak Agung Banyu Perwira dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Bandung: Remaja Rosdakary, 2005), 35.

<sup>30</sup> *ibid* hal 47

<sup>31</sup> J. Frankel, *Hubungan Internasional* (Jakarta: ANS General Books, 1999), 55.

akan mungkin mengatur dan menetapkan proses dinamika internasional sebagai akibat dari interaksi yang terus menerus antara bangsa-bangsa di dunia.

Dengan kata lain, politik luar negeri berhubungan dengan semua usaha dari sistem politik nasional untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan untuk menetapkan tindakan pengendalian terhadap lingkungannya agar dapat memenuhi nilai-nilai yang terdapat dalam sistemnya.<sup>32</sup>

Melalui bukunya, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri, Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian Pelaksanaannya*, Sufri Yusuf memberikan sebuah definisi standar menyatakan bahwa politik luar negeri itu adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada.<sup>33</sup> Karena situasi dan kondisi dunia yang tidak statis, tetapi mengalami dinamika yang terus berkembang, maka kebijaksanaan politik suatu negara selalu mengalami penyusunan atau penyesuaian dengan kondisi politik luar negeri, karena politik luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari politik dalam negeri. Oleh sebab itu kebijaksanaan politik luar negeri sangat ditentukan oleh kondisi obyektif politik dalam negeri. Apa yang dirumuskan pada politik dalam negeri, akan menjadi acuan untuk perumusan politik luar negeri yang di tujukan pada dunia internasional.

Amerika Serikat, dalam pelaksanaan politik luar negeri tentunya juga berorientasi pada kepentingan nasional yang didasarkan pada kondisi obyektif baik di dalam negeri maupun kondisi politik internasional yang berkembang saat ini. Bila ditinjau, terutama untuk politik luar negeri AS di kawasan Timur Tengah, Amerika Serikat terkesan seperti koin dengan sisi yang berbeda. Di satu sisi

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal. 133

<sup>33</sup> Sufri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri, Sebuah Analisis Teoritis dan*

Amerika Serikat mengklaim dirinya sebagai Negara penjunjung tinggi demokrasi, sementara di sisi lain Amerika Serikat mempunyai orientasi kebutuhan sumber daya alam, minyak dan gas. Di satu sisi politik luar negeri Amerika Serikat dapat berperan untuk melindungi negara lain dengan cara memperluas kepentingan AS di kawasan Timur Tengah, disisi lain AS mempunyai tugas mengubah system internasional dengan tatanan dunia baru melalui proses demokratisasi.

Ditilik dari sejarahnya, politik luar negeri Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi retorika moralitas. Hal ini senada dengan beberapa pendapat kaum idealis yang menganggap setiap Negara melakukan kebijakannya berdasarkan pada moralitas yang dimilikinya. Akan tetapi kaum realis mengkritisi hal tersebut dan menganggapnya hanyalah sebuah retorika yang utopis. Amerika Serikat, pada tahun 1918, ketika dipimpin oleh Presiden Woodrow Wilson sangat menekankan perlunya penegakan demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia baik dilakukan dengan cara aktif maupun pasif. Para ahli sejarah mengemukakan tentang adanya perdebatan mengenai perlunya penegakan terhadap nilai-nilai HAM ke seluruh dunia dengan cara-cara aktif atau hanya dilakukan dengan cara pasif. bagi sebagian orang, kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebaiknya dilakukan dengan cara pasif karena ada kekhawatiran sebagian pemimpin AS pada abad ke-18 yang memperingatkan akan adanya bahaya besar yang bisa muncul akibat keterlibatan AS yang terlampau jauh di Negara-negara yang bukan termasuk territorialnya. Kekhawatiran tersebut adalah bahwa Amerika Serikat akan menjadi kekuatan yang terlalu besar.

Singkatnya, pada periode tersebut Amerika Serikat memiliki

retorika moralitas dan hak-hak dasar manusia. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, para pemimpin Amerika membenarkan keterlibatan Amerika dalam upaya penegakan HAM di luar negeri, bahkan pada akhirnya juga penanaman kekuasaan di Kuba dan Filipina dengan dalih mendukung hak mereka untuk memerdekakan diri dari kolonialisme Spanyol. Woodrow Wilson melakukan berbagai tindakan untuk menciptakan citra pembelaan aktif, bukan pasif atas hak-hak demokrasi dan penentuan nasib sendiri dengan dalih perjuangan untuk membuat dunia ini aman bagi demokrasi.<sup>34</sup>

Pasca perang Dunia II, peranan AS dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 1945, merupakan gambaran tekad dan tindakan penegakan dan penghormatan hak-hak Asasi Manusia ke seluruh dunia. Piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara di San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945 meruakan hasil perjuangan panjang, lewat berbagai pengalaman masalah, khususnya setelah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) yang dirintis Presiden Amerika Woodrow Wilson se usai perang dunia I.<sup>35</sup>

Melalui proklamasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Declaration of Universal Principals of Human Rights*) PBB pada tanggal 10 Desember 1948, semakin memperkuat tekad PBB dengan Amerika Sebagai pioneernya guna menegakkan kehormatan HAM di seluruh dunia. Deklarasi itu mencantumkan hamper semua hak politik dan sipil dari konstitusi dan sisitem hokum nasional AS, antara lain: persamaan di depan hokum; perlindungan terhadap penangkapan yang sewenang-wenang; hak atas pengadilan yang adil; hak memiliki kekayaan; kebebasan

---

<sup>34</sup> Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat* (Yogyakarta: Piaraf Publishing, 2000), 25.

berfikir, berhati-nurani dan beragama; serta kebebasan berserikat dan berkumpul. Deklarasi tersebut juga dilengkapi dengan hak ekonomi, social dan budaya seperti hak untuk berkerja, dan memilih pekerjaan secara bebas, hak atas upah untuk pekerjaan yang sama, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh, hak untuk beristirahat dan bersenang-senang, hak atas standar hidup yang layak dan hak mendapatkan pendidikan.<sup>36</sup>

Tahun 1945, ketika Amerika dipimpin oleh Presiden Eisenhower, kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga melanjutkan cita-cita pendahulunya dengan menekankan akan perlunya penegakan HAM ke seluruh dunia. Hal ini diberlakukan guna membendung paham komunisme yang dibawa Uni Soviet kala itu. Retorika HAM diagung-agungkan secara besar-besaran guna membendung tersebarnya paham komunisme. Penegakan HAM tersebut memiliki dianggap memiliki dua kepribadian yang berbeda, yakni pada penekanan moralitas melalui penegakan HAM dan kebutuhan yang bebas nilai (menurut paham realis) guna membendung Uni Soviet dan komunisme internasional.

Akan tetapi pada masa pemerintahan Eisenhower, kebijakan Amerika Serikat menyangkut penegakan HAM mengalami kerancuan dengan kebijakan anti-komunisme. Amerika Serikat, dianggap memiliki standar ganda dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Di satu sisi Amerika menjunjung tinggi penegakan HAM, tetapi di sisi lain Amerika juga sering memberikan dukungannya kepada sekutu yang justru otoriter dan tidak demokratis, asalkan tidak komunis. Hal tersebut dilakukan melalui dukungannya dalam bentuk kerjasama pada pemerintah diktator di Portugal dan junta militer Yunani yang

dengan sangat jelas telah melakukan penindasan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia melalui penahanan politik, penindasan dan penyiksaan.

Kerancuan tersebut kembali terulang pada masa pemerintahan Jimmy Charter, dimana ia sangat bertekad dalam menyebarkan demokrasi secara lebih luas ke seluruh dunia. Dalam berbagai kebijakan politiknya, Charter bahkan dianggap sebagai presiden yang sangat menonjolkan retorika moralitas dan hak asasi manusia dibanding pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dalam sejarah perpolitikan Amerika Serikat. Jalan yang ditempuh guna penegakan nilai moralitas dan HAM tersebut ditempuh melalui 2 cara, cara damai hingga kemungkinan terburuk yakni melalui cara konfrontasi. Tindakan yang pernah diambil oleh pemerintahan Jimmy Charter antara lain kecaman yang dilakukan AS terhadap Uni Soviet yang melakukan intervensi di Afghanistan dan menindas gerakan oposisi yang ada. selain itu, AS juga secara tegas mengecam revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatulloh Khomaeni.

Pada era Presiden Barrack Obama pun kerancuan tersebut kembali terulang melalui program demokratisasinya. Sebuah teori retorika demokratisasi, *Democratic Peace theory* menyatakan bahwa sesama Negara penganut system demokrasi tidak akan saling menyerang, demokrasi dianggap sebagai angin yang bisa menimbulkan kedamaian bagi seluruh Negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Hal itulah yang menjadi landasan kuat Amerika Serikat pada waktu meng-invasi Irak dan Afghanistan yang dianggap tidak demokratis dan dipimpin oleh pemerintah yang otoriter. Akan tetapi sikap tersebut sangat kontradiktif

bukan Negara yang menganut system demokrasi melainkan monarki. Hal tersebut memunculkan asumsi bahwa Amerika Serikat, dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya, memiliki standar ganda atau dua wajah yang berbeda.

## **B. Demokratisasi Amerika Serikat di Timur Tengah**

Demokratisasi yang didengung-dengungkan oleh Amerika Serikat yang mengklaim dirinya sebagai bapak demokrasi adalah proses menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan menjadikan Negara yang tidak demokratis menjadi Negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan menjadikannya sebagai sistem pemerintahannya. Di timur tengah, terutama di era revolusi musim semi atau sering disebut dengan Arab Spring, kata demokrasi merupakan kata-kata yang sering didengung-dengungkan guna melambungkan geliat revolusi rakyat yang membara di kawasan tersebut.

Revolusi di beberapa kawasan Timur Tengah ini terjadi berawal dari kebosanan atas pemerintahan rezim otoriter yang telah lama menguasai hampir semua negara di timur tengah. Berawal dari perjuangan rakyat Tunisia yang menuntut mundur presiden Zine El Abidine Ben Ali, perjuangan rakyatpun tidak sia-sia, karena akhirnya Ben Ali mundur dari jabatan yang telah didudukinya selama 23 tahun. Keberhasilan rakyat Tunisia ini menginspirasi rakyat-rakyat di negara Timur Tengah lainnya untuk melakukan yang sama, yaitu revolusi. Muncullah gerakan perlawanan rakyat di Mesir, Libya, Bahrain, Yaman hingga Suriah. Pada akhirnya, rakyat Mesir dan Libya pun meraih kemenangan seperti yang diraih oleh rakyat Tunisia. Hosni Mubarak mundur sebagai presiden Mesir pada tanggal 11 Februari 2011 setelah menjabat selama 30 tahun. Demikian

halnya dengan tiran penguasa Libya Moammar Khadafy yang selama 41 tahun bertahta di Libya, ia berhasil dikalahkan oleh perjuangan rakyat. Khadafy lengser dari jabatannya pada Agustus 2011.

Namun, yang akan penulis soroti di sini bukanlah proses perjuangannya, melainkan keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan sekutunya dalam revolusi di Timur Tengah. Terutama terkait proses demokratisasi yang oleh banyak pihak dianggap mengandung unsur standar ganda yang diterapkan Amerika Serikat terhadap negara-negara Timur Tengah.

Membaca geliat revolusi Arab ibarat membuka lembaran buku yang masih jauh dari selesai. Terlalu dini menilai secara hitam putih bagaimana bentuk akhir bangunan dari hasil revolusi itu. Namun, nilai-nilai yang menjadi fondasi bangunan itu sudah bisa terbaca karena diusung para pemuda revolusioner ketika mereka turun ke jalan. Nilai-nilai itu adalah demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Nilai-nilai itu pula yang sejak lama diinginkan Barat berkembang di dunia Arab, khususnya setelah tragedi serangan pada 11 September 2001 di Amerika Serikat (AS).

Pada tahun 2002 dibawah pemerintahan Bush, Amerika Serikat meluncurkan program *Greater Middle East*, yang intinya adalah demokratisasi di Timur Tengah dan beberapa negara di Asia Tengah. Namun program ini banyak menemukan kendala dan melahirkan banyak kritik. Sampai akhirnya program ini mengalami kegagalan. Kini, AS kembali menemukan momentum seiring meletusnya revolusi Arab karena ada titik temu nilai-nilai yang diperjuangkan dan apa yang ingin ditanamkan AS di dunia Arab. Revolusi yang terjadi ini sering diasosiasikan dengan sebutan “musim semi” atau Arab Spring yang selalu identik

dengan gerakan pembaharuan. Tentu harapannya adalah pergolakan yang digerakkan oleh kekuatan rakyat itu akan menghasilkan pembaharuan.<sup>37</sup>

Jika kita cermati, kita dapat mengetahui mengapa AS begitu bersemangat mendukung revolusi Tunisia dan Mesir, yang dilanjutkan Libya, Yaman, dan Suriah. Hal ini tidak lain karena AS ingin menerapkan demokratisasi di Timur Tengah. Selain itu AS juga memiliki kepentingan nasional yang sangat signifikan di Timur Tengah. Atas dasar itulah mengapa AS mencampakkan begitu saja sekutu terdekat mereka yang selama ini menjadi bumper kepentingan AS di Timur Tengah, seperti mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, mantan Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali, dan mantan penguasa Libya Moammar Khadafy, serta Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Dari sini jelas terlihat politik pragmatis yang dijalankan oleh AS. Dulunya AS mendukung para penguasa itu, namun ketika melihat bahwa era diktatorisme di dunia Arab telah berakhir, mereka pun segera mengubah strategi politiknya dan membanting setir berpura-pura menyokong gerakan rakyat menentang kediktatoran. Dengan cara itu, AS berupaya membonceng transformasi di kawasan Timur Tengah untuk kepentingannya sendiri.

Tidak hanya dengan dukungan lisan, AS dan sekutu bahkan menunjukkan sokongan seriusnya terhadap perjuangan rakyat Libya menentang kediktatoran rezim Moammar Khadafy dengan melancarkan serangan militer terhadap pasukan loyalis Khadafy. Walaupun kemudian AS menarik pasukannya (sekutu masih tetap ada), tapi dukungan penuh tetap mereka berikan kepada rakyat Libya. Sampai akhirnya rakyat Libya berhasil meraih kemenangan yang

selama ini dicita-citakan. Namun perjuangan rakyat Libya ini bukan merupakan faktor tunggal penentu jatuhnya rezim Khadafy. Hal ini lebih didasari oleh keikutsertaan AS dan sekutu dalam proses revolusi tersebut. Begitu juga halnya dengan negara Timur Tengah lain yang mengalami proses revolusi, AS dan sekutu tetap mendukung perjuangan rakyat di negara tersebut.

Namun demikian, kebijakan AS yang terkesan pro-demokrasi itu tidak berlaku bagi revolusi rakyat di Bahrain. AS dan sekutu, bahkan dunia Arab, tampak memiliki standar ganda dalam menyikapi kasus Bahrain. Mereka bahkan menyokong intervensi militer Arab Saudi dan pembubaran gerakan perlawanan rakyat di Bahrain. Padahal, motif dan tujuan kebangkitan rakyat Bahrain tidak ada bedanya dengan negara-negara Arab lain seperti Mesir, Tunisia, ataupun Libya yang juga menginginkan tumbangnyanya penguasa yang otoriter.

Reaksi berbeda Barat terhadap kasus Bahrain ini dilatarbelakangi oleh posisi strategis negara kecil di Teluk Persia itu dan kekhawatiran atas implikasi efek domino dari tumbangnyanya rezim monarki Dinasti Al-Khalifa bagi negara-negara Arab lain di kawasan Teluk Persia. Padahal kediktatoran rezim dinasti Al-Khalifa tak kalah dibanding dengan diktator-diktator Arab lainnya seperti Hosni Mubarak di Mesir, Moammar Khadafy di Libya ataupun Ali Abdullah Saleh di Yaman. Di satu sisi, AS dan sekutu menyebut-nyebut Khadafy sebagai penguasa yang haus akan darah rakyatnya, namun di sisi lain mereka diam seribu bahasa akan pembantaian massal yang dilakukan rezim Al-Khalifa dan militer Arab Saudi terhadap rakyat Bahrain.

Meski terbilang kecil, namun AS dan Arab Saudi memiliki kepentingan sangat strategis di Bahrain yang tak mungkin bisa dilepas begitu saja

Sebagaimana diketahui, pangkalan Armada Angkatan Laut Kelima AS berada di Bahrain. Bagi Arab Saudi, negeri kecil itu terbilang sebagai negeri yang berada di bawah lindungannya. Kalau saja rezim monarki Al-Khalifa di Bahrain berhasil ditumbangkan, tentu hal itu tidak hanya berpengaruh buruk terhadap kepentingan AS di kawasan tetapi juga terhadap keberlangsungan rezim-rezim monarki serupa di negara-negara Arab lainnya seperti Arab Saudi selaku sekutu penting AS di Timur Tengah. Karena itu dalam menyikapi revolusi rakyat Bahrain, AS tidak hanya mempertahankan hubungan dekatnya dengan rezim Al-Khalifa, tapi sebaliknya justru menyokong intervensi militer Arab Saudi untuk melumpuhkan gerakan revolusi. Atas dasar itulah, AS akan mempertahankan status quo di Bahrain, berapa pun harganya.

### **C. Amerika Serikat dalam Konflik Israel-Palestina**

Amerika Serikat, secara sangat jelas, memiliki kepanjangan tangan di kawasan Timur Tengah yakni pada kehadiran Negara Israel. Tak jarang, dalam berbagai kesempatan seperti sidang Dewan Keamanan PBB Amerika banyak mendukung langkah-langkah yang dilakukan Israel dalam melakukan pendudukan di tanah Palestina. Dalam bidang militer dan ekonomi, Amerika Serikat secara terang-terangan juga memberikan sokongan dana kepada Negara zionis tersebut. Dalam kampanye politiknya, kala itu calon Presiden (yang sekarang menjabat kembali menjadi presiden) Barrack Obama mengumumkan bahwa gedung putih menyediakan dana 70 juta dolar yang dipergunakan untuk sector bantuan militer bagi Israel. Presiden kulit hitam pertama di AS tersebut mengatakan bahwa

yang disebut Iron Dome yang akan mencegat serangan-serangan roket yang dilakukan militan Palestina dari Gaza. Dana baru untuk sistem penangkal serangan misil '*Iron Dome*' merupakan tambahan dari 205 juta dolar yang telah disetujui untuk program itu tahun lalu. Tambahan dana sebesar 70 juta dolar itu diumumkan bulan Mei.<sup>38</sup>

Pada Agustus 2007, kedua negara memperbarui memorandum of understanding (MoU) mengenai bantuan militer. Melalui MoU itu, Amerika Serikat bersedia untuk memberikan bantuan militer kepada Israel senilai USD 30 miliar dalam jangka waktu 10 tahun. Sebelumnya, Israel menerima bantuan militer dari Amerika Serikat sebesar USD 2,4 miliar per tahun. Dengan kesepakatan baru itu, Israel mendapatkan tambahan dana sebesar USD 600 juta per tahun.<sup>39</sup> Dukungan serupa juga pernah datang dari mantan Presiden AS, Ronald Regan, pada tanggal 21 Februari 1983, yang meminta kepada seluruh negara-negara Arab agar menerima eksistensi Israel sesuai dengan realitas yang ada.<sup>40</sup>

Dilihat dari sejarahnya, keberadaan Israel di kawasan Timur Tengah sangatlah dipenuhi dengan kontroversi yang berkepanjangan. Konflik antara Negara Zionis tersebut melawan perlawanan rakyat Palestina yang merasa dijajah yang dipimpin oleh Hamas seakan-akan tidak akan berakhir dalam waktu dekat ini. Konflik yang berkepanjangan tersebut slalu menemui jalan buntu jika

---

<sup>38</sup> *Obama Umumkan Bantuan Bagi Israel Sebelum Lawatan Romney* (diakses pada tanggal 22 Februari 2013) dalam <http://www.voaindonesia.com/content/obama-umumkan-bantuan-bagi-israel-sebelum-lawatan-romney/1448184.html>

<sup>39</sup> *Di Balik Agresi Israel ke Gaza* (diakses pada tanggal 21 Februari 2013) dalam <http://habibiecenter.or.id/detilur/id/183/news/Di.Balik.Agresi.Israel.ke.Gaza>

<sup>40</sup> *Siapa Bermain di Konflik Israel-Palestina* (diakses pada tanggal 21 Februari 2013) dalam <http://realistik.kompasiana.com/2012/11/20/siapa-bermain-di-konflik-israel-palestina-510361.html>

dihubungkan dengan penyelesaian resolusi damai antara dua pihak yang berseteru. Bagi beberapa Negara dengan mayoritas penduduknya muslim, kedaulatan Israel sebagai negara tidak sepenuhnya mendapat dukungan dan pengakuan. Beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dll, tidak mengakui kedaulatan tersebut. Sampai suatu saat kaum yahudi bersiasat untuk menduduki tanah yang mereka yakini sebagai tanah leluhur mereka. Keyakinan tersebutlah yang mendorong mereka melakukan segala cara untuk dapat menjadikan Palestina sebagai tempat tinggal mereka.

Salah satu cara yang digunakan guna menjadikan Palestina sebagai wilayah teritorial Israel ialah dengan melakukan konspirasi dengan sejumlah negara di Eropa dan Amerika. Mereka bermaksud memecah belah kekhilafahan Ustmaniyah yang kala itu menjadi penghalang utama kaum yahudi dalam melancarkan aksinya. Khilafah Ustmaniyah dengan pemimpinnya Sultan Abdul Hamid merupakan penjaga setia bangsa Palestina. Mereka (para khilafah) berulang kali melakukan perlawanan dan mengusir bangsa-bangsa Eropa yang berusaha merebut kekuasaan di Palestina. Sampai pada akhirnya kaum yahudi dengan sekumpulan gerakan bawah tanah mereka, salah satunya Freemasonry, berhasil menaklukan kejayaan Sultan Abdul Hamid.<sup>41</sup>

Sejak saat itu, pada kisaran tahun 1917, kaum yahudi lainnya mulai berbondong-bondong bermigrasi ke tanah Palestina dan mendirikan tempat tinggal di sana. Kaum yahudi semakin percaya diri setelah Inggris, sebagai negara

---

<sup>41</sup> *Esensi Konflik Israel Palestina dari Sisi Geopolitik-Ekonomi* (diakses pada tanggal 21 Februari 2012) dalam <http://www.penerbitkompasiana.com/2012/11/10/esensi-konflik-israel-palestina-dari->

yang turut membantu menaklukan bani Ustmaniyah pada Perang Dunia I, mengeluarkan mandat terkait eksistensi kaum yahudi pada Konferensi San Remo di tahun 1920.<sup>42</sup> Pasca pendudukan bani Israil di Palestina, masih sering terjadi perselisihan antara penduduk asli Palestina dengan kaum imigran tersebut. Sampai suatu ketika (1947) PBB dengan sewenang-wenang membagi negara tersebut menjadi dua bagian. Resolusi PBB tersebutlah yang menjadi cikal bakal pembentukan negara yahudi yang saat ini dikenal dengan sebutan Israel.

Perselisihan yang terjadi antara Israel dan Palestina memang tidak secara eksplisit terkait faktor akidah, karena pada kenyataannya wilayah Palestina adalah wilayah yang heterogen yang dipenuhi oleh orang dengan berbagai latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda-beda seperti islam, Kristen bahkan Yahudi. namun tidak menutup kemungkinan kondisi-kondisi yang saat ini dijadikan kedok suatu saat akan secara jelas mengarah kepada akidah yang akan berujung pada perang agama. Terlepas dari kaitannya dengan akidah, rasanya patut pula kita telusuri motif lain yang ada di balik perselisihan dua negara yang dalam Al-Quran dikatakan akan terus berseteru hingga akhir zaman (hari kiamat) ini.

Peningkatan eskalasi ketegangan di Jalur Gaza yang terjadi belakangan ini menjadi tak jelas penyebabnya karena masing-masing pihak, baik Israel maupun Hamas, saling mengklaim bahwa diri mereka hanya melakukan upaya bela diri atas serangan yang dilancarkan satu sama lainnya. Persoalan seakan menjadi semakin pelik karena masing-masing pihak menolak menghentikan

.....

tersebut tentu akan berdampak pada perluasan konflik yang tidak mungkin tidak menimbulkan korban jiwa dari pihak sipil. Namun, bukan masalah siapa yang menyerang dan siapa yang diserang, dalam konflik tersebut jika ditilik secara mendalam, mengandung pesan politik yang hendak disampaikan salah satu pihak, yakni Israel, kepada dunia internasional, yaitu eksistensi.

Secara geopolitis, Israel memiliki keterkaitan yang erat dengan Amerika Serikat. Israel menjadi negara yang strategis untuk dijadikan instrumen bagi Amerika dalam melaksanakan segala kebijakannya di Timur Tengah. Alasan dipilihnya Israel oleh Amerika untuk dijadikan sebagai alat (kepanjangan tangan) di kawasan Timur Tengah dikarenakan hubungan yang telah terjalin sejak lama antara Amerika dengan kaum yahudi, bahkan sejak sebelum didirikannya negara Israel sekali pun. Selain itu, baik Amerika maupun kaum yahudi itu sendiri, sama-sama merupakan bekas tawanan Inggris pada era abad ke-17. Sehingga tak heran kalau Amerika dan Israel terlihat seperti kakak dan adik yang saling mendukung satu sama lainnya.

Singkatnya, keberadaan Israel di kawasan Timur Tengah selalu mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Israel selalu ditempatkan pada posisi terhormat. Ia bak “anak emas” AS. Sehingga muncul anekdot bahwa AS ialah Israel kecil, dan Israel adalah Amerika besar. Dengan kuatnya lobi Israel di parlemen Amerika, maka mau tak mau setiap tindakan Israel dipastikan mendapat dukungan dari Amerika.<sup>43</sup> Kuatnya dukungan AS dalam melindungi Israel disebabkan oleh kuatnya lobi lembaga-lembaga Yahudi di kongres AS dan

---

<sup>43</sup> *Siapa Bermain di Konflik Israel-Palestina* (diakses pada tanggal 21 Februari 2013) dalam

Gedung Putih, selain itu juga tak lepas dari adanya kepentingan AS di Timur Tengah melalui negara Israel. Keberadaan Israel di wilayah Timur Tengah dijadikan oleh AS sebagai penyeimbang di tengah-tengah dominasi negara-negara Arab. Karenanya, AS merasa perlu menancapkan kukunya di Timur Tengah dengan melindungi keberadaan negara Israel.

Israel melakukan beberapa kali serangan ke wilayah Palestina hingga agresi yang sangat brutal ke wilayah tersebut sehingga menimbulkan korban jiwa dan kecaman dunia internasional. Keberanian Israel melancarkan agresi militer di Jalur Gaza tentu tidak datang begitu saja, tanpa adanya dukungan moral dan politik dari Amerika Serikat selaku sekutu utama. Dalam rapat darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna membahas eskalasi kekerasan di Gaza, Amerika Serikat menyatakan dukungan terhadap hak Israel untuk membela diri dalam menghadapi serangan-serangan roket kelompok militan Palestina.

Oleh beberapa kalangan, setidaknya ada tiga kepentingan yang hendak dicapai oleh Amerika melalui dukungannya kepada Israel:<sup>44</sup>

1. Amerika Serikat ingin menciptakan opini publik dunia internasional bahwa kegagalan untuk mewujudkan pendirian Palestina merdeka pada empat tahun pertama masa pemerintahan Barack Obama lalu, bukan disebabkan ketidakseriusan Amerika Serikat selaku penggagas solusi dua negara, melainkan lebih diakibatkan tindakan-tindakan tidak bersahabat Hamas selaku penguasa di Jalur Gaza.

---

<sup>44</sup> *Di Balik Agresi Israel ke Gaza* (diakses pada tanggal 21 Februari 2013) dalam [http://habibiacenter.or.id/detail/id/183/news/Di\\_Balik\\_Agresi\\_Israel\\_ke\\_Gaza](http://habibiacenter.or.id/detail/id/183/news/Di_Balik_Agresi_Israel_ke_Gaza)



badan khusus PBB pada bulan Juli 2000 yang menangani Inspeksi Senjata Kimia yaitu UNMOVIC, bahwa Irak diduga masih menyembunyikan senjata kimia di negerinya.<sup>45</sup> Berdasarkan laporan tersebut, Amerika Serikat melakukan beberapa langkah untuk menginvestigasi senjata di Irak. Laporan tersebut tidak serta merta membuat AS mengeluarkan kebijakan luar negerinya yakni untuk melakukan invasi ke wilayah Irak. Baru pasca tragedi 11 September Amerika melakukan evaluasi besar-besaran tentang system keamanan internalnya yang dibobol hingga hancurnya pusat kegiatan ekonominya, gedung World Trade Center (WTC). Amerika Serikat mulai mencari kambing hitam atas peristiwa tersebut. Hingga disangkakan bahwa dalang dari penyerangan dua gedung kembar tersebut adalah pimpinan jaringan teroris Al Qaeeda, Osama bin Laden yang dianggap memiliki hubungan baik dengan Presiden Irak, Saddam Husein.

Modus utama penyerangan Irak oleh Amerika adalah kebijakan luar negeri Amerika yaitu ingin memberantas jaringan terorisme internasional. Peristiwa 11 September menimbulkan efek yang sangat luar biasa bagi Amerika baik kedalam maupun keluar. Kebijakan kedalam adalah pengawasan ketat terhadap pria keturunan arab yang hendak berkunjung ke Amerika baik yang teridentifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik maupun dari nama yang mengandung unsur Islam, juga sebagian umat Islam yang berada di Amerika di mata-matai dan di Introgasi, dll. Sedangkan kebijakan keluar yaitu invasi ke Irak karena indikasi keterkaitan Saddam Husein dengan Osama bin Laden.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>*Invasi Amerika Serikat ke Irak: Penghapusan Sejarah Peradaban* (diakses pada tanggal 23 Februari 2013) dalam <http://bankam.kompasiana.com/2011/12/05/invasi-amerika-serikat-ke-irak->

Jika ditelusuri dari motifnya, Konflik senjata antara AS (sebagai Negara penjungjung tinggi nilai demokrasi dan penentang segala bentuk kediktatoran) dengan Irak pada tahun 2003 memiliki tiga tujuan utama, ada tiga tujuan yaitu AS ingin menghancurkan senjata pemusnah massal, menyingkirkan ancaman teroris internasional dan membebaskan rakyat Irak dari penindasan rezim Saddam Hussein dengan cara memulihkan demokrasi di Irak.

Tetapi dari ketiga alasan yang mendasari penyerangan Amerika Serikat tersebut, ditemukan bahwa alasan tersebut merupakan alasan yang dibuat-buat oleh AS yang kala itu dipimpin oleh Presiden George Walker Bush. Dengan kata lain, agresi AS ke Irak untuk memusnahkan senjata pemusnah massal adalah upaya AS untuk membohongi masyarakat internasional. Karena pada kenyataannya, saat ini tidak ditemukan sama sekali senjata pemusnah masal pasca hancurnya pemerintahan Saddam Husein di negeri kaya minyak tersebut. Begitu pula dengan keberadaan Osama bin Laden yang ternyata fiktif.

Klaim Washington bahwa penggulingan Saddam Hussein dimaksudkan untuk menyelamatkan rakyat Irak dari pemerintah yang diktaktor dan otoriter serta agar rakyat dapat mendirikan pemerintahan yang benar-benar demokratis juga cacat dari sisi hukum. Baik PBB maupun negara di dunia tidak ada yang memberi legitimasi AS untuk ikut campur urusan dalam negara lain. Dalam kasus Irak, apapun sistem yang telah dan akan diterapkan di negara itu, demokrasi atau monarki, maka hasil itu semuanya menjadi hak rakyat Irak untuk menentukannya.

Di Irak, meskipun AS mengatakan Saddam Hussein sebagai diktator, tetapi rakyat Irak (kecuali suku Kurdi) menganggap Saddam Hussein sebagai

sosok yang berani mempertahankan kedaulatan Irak dari serbuan AS dan sekutunya. Saat menghadapi invasi AS, Saddam Hussein telah menyerukan kepada rakyatnya agar tetap siaga menghadapi agresi militer AS. Seruan itu disambut rakyat yang menyatakan akan membela pemimpinnya, yaitu Saddam Hussein dan membela tanah Irak.<sup>47</sup>

Menurut Wirawan Sukarwo terdapat dua alasan utama yang melatarbelakangi serangan AS ke Irak. Pertama, keinginan AS untuk menghentikan proyek pengembangan senjata pemusnah massal di Irak. Kedua, menjatuhkan rezim Saddam Hussein yang dianggap memiliki hubungan dengan Al-Qaeda yang mengancam stabilitas regional. Dari kedua alasan utama tersebut, Pemerintah AS menjabarkannya dalam beberapa misi mereka untuk Irak. Bahkan pemerintah AS menganggap sebagai tugas mulia. Beberapa misi invasi yang dianggap sebagai tugas mulia AS, antara lain sebagai berikut : (1) Mengakhiri rezim Saddam Hussein; (2) Mengidentifikasi, mengisolasi, dan mengeliminasi senjata pemusnah massal; (3) Mencari, menangkap, dan membawa keluar teroris dari Negara itu; (4) Mengumpulkan data intelijen terkait yang bisa digunakan dalam jaringan pemberantasan terorisme internasional; (5) Mengumpulkan data intelijen yang terkait dengan jaringan global di pasar gelap perdagangan senjata pemusnah massal; (6) Mengakhiri sanksi dan secepat mungkin mengirim bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Irak; (7) Mengamankan sumber-sumber ladang minyak yang menjadi milik rakyat Irak; (8) AS akan menjadi

penolong rakyat Irak menciptakan masa transisi untuk membangun sebuah pemerintahan yang representatif.<sup>48</sup>

Namun semua alasan yang dikeluarkan oleh AS menjadi sebuah kebohongan yang diketahui secara luas oleh dunia internasional. Irak terbukti tidak mengembangkan senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan dan Saddam Hussein tidak memiliki hubungan dengan Osama bin Laden beserta jaringan al-Qaedaanya.

Dari semua analisis terhadap motif invasi AS yang sesungguhnya, terdapat persepsi umum bahwa ekonomilah yang menjadi faktor dominan. Beberapa perhitungan yang terkait dengan motif ekonomi dan bisnis dari serangan AS atas Irak antara lain sebagai berikut : (1) Kekayaan minyak bumi yang dimiliki oleh Irak merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Centre for Global Energy Studies* (CGES) London, Irak diperkirakan memiliki 112 miliar barrel cadangan minyak. Berdasarkan data tersebut, Irak merupakan pemilik 11 persen cadangan minyak dunia. Selain itu, menurut *US Energy Information Administration*, Irak memiliki 73 ladang minyak mentah dan hanya 15 ladang yang telah dikembangkan; (2) ingin menciptakan tatanan dunia baru yang “lebih aman” dengan tujuan kebebasan ekonomi dan politik. Hal ini merupakan strategi geopolitik AS di kawasan Timur Tengah. Bagi AS, Irak merupakan ancaman potensial bagi kepentingannya dan sekutu terdekatnya Israel di kawasan Timur Tengah; (3) Dan yang terakhir, alasan perang yang akan menguntungkan AS. Kehancuran

infrastruktur akibat perang akan melahirkan proyek-proyek rekonstruksi dengan dana yang besar. Sebagai pemeran utama invasi, AS akan mengambil proyek-proyek tersebut untuk meraup keuntungan besar pascaperang.<sup>49</sup>

Secara ideologis, adanya invasi Amerika ke Irak adalah upaya yang dilakukan AS sebagai cara penghapusan salah satu sejarah peradaban dunia yang terdapat dalam bentuk bangunan-bangunan, naskah-naskah dan berbagai bukti sejarah kegelimangan Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Hal ini terbukti dengan hancurnya situs-situs sejarah islam yang saat ini telah hilang dan hancur. Ditilik dari sejarahnya, Irak merupakan pusat peradaban dunia ketika abad 750-1258 M ketika kekhalifahan Bani Abbasiyah. Popularitas daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman khalifah Harun Ar-Rasyid *Rahimahullah* (786-809 M) dan puteranya al-Ma'mun (813-833 M). Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial, dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusasteraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi.

Di sisi lain, invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut meninggalkan kerugian yang sangat banyak bagi Amerika Serikat sendiri terlebih bagi Irak selaku Negara yang diserang. Dari pihak Amerika, kerugian yang sangat besar adalah dengan terbunuhnya para prajurit perang mereka serta besarnya dana

lebih parah diderita dengan terbunuhnya ribuan orang baik dari kalangan tentara maupun rakyat sipil. Bahkan mantan Presiden Saddam Husein pun ditangkap dan dihukum mati. Sumber-sumber pemerintah Irak merilis angka resmi yang mengejutkan akibat pendudukan militer Amerika Serikat di negara itu. Data yang dipublikasikan oleh Departemen Urusan Perempuan Irak menunjukkan bahwa invasi militer itu telah meninggalkan satu juta janda. Menurut laporan itu, titik perkiraan resmi lainnya adalah lebih dari 2.500.000 kasus kematian sebagai akibat dari invasi, selain empat juta anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh perang. Kementerian Dalam Negeri Irak juga telah merilis data yang menunjukkan sekitar delapan ribu orang dinyatakan hilang di negara itu pada Januari 2008.<sup>50</sup>

Tragedy penyerangan AS atas Irak tersebut banyak mendapatkan kecaman dari dunia Internasional. Bahkan Presiden Amerika Serikat saat ini, Barrack Obama yang kala itu masih menjabat sebagai Senator Illinois, Obama mengecam invasi AS ke Irak dan menyebutnya sebagai 'perang bodoh'.<sup>51</sup> Dari luar negeri, jutaan orang juga melakukan demonstrasi menolak kebijakan invasi ke Irak tersebut dan mendorong langkah damai yang ditempuh guna menjaga perdamaian dunia.

---

<sup>50</sup> *Invasi AS ke Irak Sisakan Satu Juta Janda* (diakses pada tanggal 23 Februari 2013) dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/06/21/ln4you-invasi-as-ke-irak-sisakan-satu-juta-janda>

<sup>51</sup> *Obama: Sejarah Akan Menilai Invasi AS ke Irak* (diakses pada tanggal 23 Februari 2013) dalam <http://news.detik.com/read/2011/12/13/121514/1789818/1148/obama-sejarah-akan-menilai-invasi>